

Analisis Kualitas Kinerja Norma Standar Pedoman Kriteria (NSPK) dan Rencana Tata Ruang (RTR) Di Direktorat Kemitraan Agraria Tata Ruang Menggunakan Aplikasi Dashboard System

Nia Komalasari¹, Djamaludin²

^{1,2} Jurusan Teknik Informatika TI Universitas Islam Syekh-Yusuf
Jln. Maulana Yusuf No 10 – Babakan Kota Tangerang

¹nia@unis.ac.id

²djamaludin@unis.ac.id

Intisari— Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kualitas kinerja Norma Standar Pedoman dan Kriteria (NSPK) dan Rencana Tata Ruang (RTR) dan pengukuran kinerja secara terus-menerus untuk memastikan bahwa proses yang dijalankannya dapat mencapai standar mutu tertentu, metode analisis yang digunakan adalah metodologi pengembangan dashboard dengan kesesuaian Key Performance Indicators (KPI), hasil penelitian sudah diujicobakan dengan tampilan antar muka visual yang menyajikan KPI secara sekilas namun eye-catching dalam satu layar.

Kata kunci— sistem dashboard, kualitas kinerja NSPK, RTR

Abstract— The purpose of this study was to determine the performance quality of the Standard Guidelines for Standards and Criteria (NSPK) and Spatial Planning (RTR) and continuous performance measurement to ensure that the processes carried out can achieve certain quality standards, the analytical method used is the dashboard development methodology with the suitability of the Key Performance Indicators (KPI), the results of the research have been tested with a visual interface that presents KPI at a glance but eye-catching on one screen.

Keywords— dashboard system, NSPK performance quality, RTR

I. PENDAHULUAN

Direktorat Kemitraan Agraria dan Tata Ruang telah menghasilkan banyak produk atau *output* namun *outcome*-nya belum terukur bagaimana implementasinya di daerah-daerah. Salah satu aktifitas dalam monitoring dan evaluasi itu adalah dengan mengukur kualitas kinerja, dalam hal ini pengukuran Norma Standar Pedoman dan Kriteria (NSPK) dan Rencana Tata Ruang (RTR). Agraria dan Tata Ruang melakukan monitoring dan pengukuran kinerja secara terus-menerus untuk memastikan bahwa proses yang dijalankannya dapat mencapai standar mutu tertentu. Pengukuran kondisi kinerja NSPK dan RTR memerlukan data dan informasi dari seluruh bagian. Informasi yang didapatkan perlu disajikan dalam bentuk yang mudah dipahami. *Dashboard* merupakan sebuah alat yang memberikan tampilan antar muka visual, yang mengkonsolidasikan dan menyajikan *Key*

Performance Indicators (KPI) secara sekilas dalam satu layar. KPI merupakan indikator utama dari kinerja proses yang dijalankan institusi.

Pada penelitian ini akan dilakukan perencanaan sistem *dashboard* untuk kebutuhan Direktorat Kemitraan khusus pada penelitian kualitas kinerja NSPK dan RTR. Metode yang digunakan pada penelitian ini mengacu pada metodologi pengembangan *dashboard* yang pernah dikembangkan pada penelitian sebelumnya. Metodologi tersebut menjamin kesesuaian antara KPI dashboard.

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan pembatasan masalah tersebut di atas maka dapat ditentukan rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana cara mengukur kualitas kinerja pembuatan NSPK dengan menggunakan Dashboard System di Tata Ruang

2. Bagaimana pengaruh pemanfaatan teknologi berbasis *mobile* terhadap penghematan biaya operasional monitoring dan evaluasi produk NSPK dan RTR di Direktorat Perencanaan Kementerian Agraria Tata Ruang dan BPN

A. Tujuan penelitian

1. Mengetahui secara pasti perkembangan produk Norma Standar Pedoman Kriteria dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten yang telah dihasilkan setiap Kabupaten di seluruh Indonesia.
2. Mengetahui tingkat pemahaman stakeholder terhadap muatan NSPK.
3. Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi Penyusunan NSPK sesuai dengan PERMEN;
4. Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi Penyusunan RTRW;
5. Mengetahui dengan mudah dan jelas implementasi PERMEN di Dinas Kabupaten/Kota
6. Membuat semua hasil dan laporan termuat dalam dashboard agar lebih mudah sinkronisasi, untuk proses evaluasi dan pengambilan keputusan

B. Beberapa Teori Terkait

Aplikasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *Application* yang berarti penerapan, lamaran dan penggunaan. Secara istilah aplikasi merupakan sebuah program siap pakai yang dipakai untuk melaksanakan suatu fungsi bagi pengguna atau aplikasi yang lain dapat digunakan oleh sasaran yang dituju.

Perencanaan dashboard dilakukan melalui 4 (empat) aktifitas utama yaitu analisis meta-informasi KPI, perencanaan fungsionalitas dashboard, analisis konten dan hierarki informasi, dan perencanaan hierarki komunikasi pengguna.

C. Analisis Meta-Informasi Pengguna

Analisis meta-informasi dilakukan untuk menemukan elemen-elemen informasi yang menyertai setiap KPI seperti sumber data, periode data, granularitas, ukuran dan

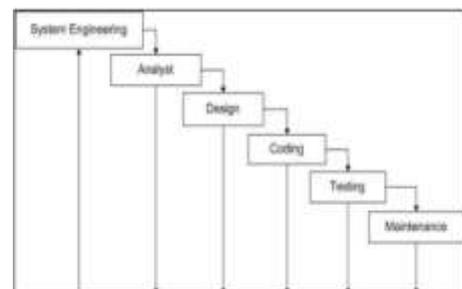
perhitungan, *threshold*, serta *alert*. Prioritas untuk setiap KPI ditentukan dengan menggunakan skala 1-4. Skala 1 menyatakan prioritas "paling penting", skala 2 menyatakan "penting", skala 3 menyatakan "sedang", dan skala 4 menyatakan "biasa"(tidak diprioritaskan). Sedangkan dari 7 bidang yang ada, dapat diketahui bahwa bidang akademik serta penelitian dan publikasi ilmiah merupakan bidang yang harus diutamakan.

D. Perencanaan Fungsionalitas Dashboard

Perencanaan fungsionalitas dashboard didasarkan pada kebutuhan bisnis pengguna. CBQ dari hasil identifikasi kebutuhan bisnis menjadi dasar dalam menentukan fungsionalitas dashboard. CBQ yang diprioritaskan oleh pengguna menjadi fungsi utama dashboard. Sedangkan CBQ yang lain menjadi fungsi tambahan bagi dashboard. Informasi yang mendukung fungsi utama ditampilkan pada layar utama dashboard, sedangkan informasi pelengkap yang mendukung fungsi tambahan, disajikan dalam layar yang berbeda. Informasi pelengkap tersebut dapat diakses melalui fasilitas *drill down*, *tabs*, maupun *pivot*.

II. METODOLOGI PENELITIAN

Langkah awal yang dilakukan penyusun dalam membangun sistem informasi adalah dengan menentukan model sistem informasi yang akan dipakai. Dalam hal ini penyusun menentukan atau memilih model sistem informasi tersebut dengan salah satu model sistemnya menggunakan model sistem waterfall. Model sistem berstruktur seperti gambar di bawah ini :



Gambar 1. Model Sistem Waterfall

Model sistem seperti ini menuntut cara yang teratur dari suatu rangkaian yang mendekati perkembangan *software* (perangkat lunak). Perkembangan *software* ini dimulai dengan suatu tingkatan kemajuan-kemajuan melalui analisis (*analyst*), perancangan (*design*), pengkodean (*coding*), pengujian (*testing*) dan pemeliharaan (*maintenance*). Model sistem informasi seperti diatas meliputi beberapa aktifitas berikut:

a. *System Engineering* :

Software (perangkat lunak) selalu menjadi bagian dari sebuah sistem informasi yang besar. Maka pekerjaan awalnya dimulai dengan menentukan syarat untuk semua unsur sistem itu, kemudian menentukan pengolah syarat-syarat tersebut pada *software*. Sistem ini sangat diperlukan apabila *software* harus disatukan dengan *hardware* (perangkat keras), manusia dan dasar fakta. Teknik dan analisisnya mencakup pada level sistem dengan pola toplevel pada perancangan dan analisa.

b. *Analyst* (Analisis) :

Syarat untuk pengumpulan cara atau proses yang menunjang agar berfokus pada spesifik *software* (perangkat lunak). Untuk mengetahui sifat dari program yang akan dibangun, maka analisis *software* (perangkat lunak) harus mengerti penuh informasi untuk *software* (perangkat lunak) itu dan fungsi yang diminta serta dapat menjelaskannya. Syarat sistem sebuah *software* (perangkat lunak) harus didokumentasikan karena nantinya akan ditujukan kepada pemakainya.

c. *Design* (Perancangan) :

Perancangan *software* (perangkat lunak) merupakan langkah proses yang berfokus pada program-program struktur data, teknik *software* (perangkat lunak), prosedur detail dan penggolongannya. Proses perancangan juga menjelaskan syarat ke dalam sebuah gambaran dari *software* (perangkat lunak) yang telah ditentukan mutu serta kualitasnya sebelum dibuatkan kode. Syarat-syarat perancangan juga didokumentasikan dan akan

menjadi bagian dari susunan *software* (perangkat lunak).

d. *Coding* (Pengkodean) :

Agar dapat dibaca oleh *software* (perangkat lunak) sebuah perancangan harus diterjemahkan secara maksimal. Langkah-langkah untuk memberi kode dilakukan pada tahap ini. Perancangan memang harus dilaksanakan dengan cara yang detail, tapi untuk pengkodean dapat menyelesaikan perancangan secara mekanikal.

e. *Testing* (Pengujian) :

Setiap satu kali kode dihasilkan, maka pengujian programnya dimulai. Proses ujian berfokus pada logika bagian dalam *software* (perangkat lunak) yang menjamin semua pernyataan telah diuji dan pada fungsional luar mengadakan pengetesan untuk menemukan kesalahan-kesalahan. Dan menjamin bahwa definisi input akan menghasilkan hasil yang sebenarnya sesuai dengan permintaan.

f. *Maintenance* (Pemeliharaan) :

Suatu *software* (perangkat lunak) pada kenyataannya akan menjalani atau mengalami perubahan setelah disampaikan kepada penggunaannya. Perubahan itu akan terjadi bila ditemui kesalahan.

Karena itu *software* (perangkat lunak) harus dapat menyesuaikan dalam perubahan lingkungan luar (eksternal) atau apabila pemakainya meminta peningkatan. Pada waktu pemeliharaan juga dibutuhkan pendahuluan pada langkah-langkah programnya untuk membangkitkan gairah pada perbaikan yang terbaru.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berikut ini disajikan mengenai profil responden berdasarkan jabatan, usia, dan masa kerja di 7 (tujuh) Provinsi yaitu Kalimantan Selatan, Jawa Barat, Gorontalo, Jawa Tengah, Belitung, Sumatera Barat dan Bali di dinas yang

mengelola Tata Ruang pada daerah tersebut yaitu Dinas Pekerjaan Umum, BAPPEDA Badan Perencana Pembangunan Daerah dan IAP (Ikatan Ahli Perencanaan).

Tabel 1
 Profil Responden Berdasarkan Jabatan

Jabatan	Jumlah	Persentase
Eselon 3	7	15,2
Eselon 4	16	34,8
Praktisi	3	6,5
Staf	20	43,5
Total	46	100,0

Sumber: Hasil pengolahan data 2018

Tabel 2
 Profil Responden Berdasarkan Usia

Usia	Jumlah	Persentase
<30	3	6.5
30-	12	26.1
35	9	19.6
36-	8	17.4
40	7	15.2
41-	7	15.2
45		
46-		
50		
>50		
Total	46	100,0

Sumber: Hasil pengolahan data 2018

Responden yang mengisi kuesioner berumur antara 22 sampai 55 tahun, responden yang paling banyak mengisi adalah yang berusia antara 30-35 yaitu sebanyak 12 orang.

Tabel 3
 Profil Responden Berdasarkan Masa Kerja

Usia	Jumlah	Persentase
1-5	22	47.8
6-10	17	37.0
11-15	4	8.7
>15	3	6.5
Total	46	100,0

Sumber: Hasil pengolahan data 2018

Responden yang mengisi kuesioner telah bekerja di bidang tata ruang antara 1 sampai 27 tahun, dan yang paling banyak berada pada rentang 1-5 tahun, yaitu sebanyak 22 orang.

Berikut ini rekapitulasi berdasarkan asal responden

Tabel 4 Rekapitulasi Responden
 Berdasarkan Asal Daerah

Asal Responden	Jumlah
Praktisi	5
Provinsi	19
. Jawa Barat	4
. Kalimantan Selatan	4
. Gorontalo	4
. Jawa Tengah	3
. Sumatera Barat	3
. Bali	2
Kabupaten/Kota	22
. Banjarbaru	2
. Banjarmasin	3
. Gorontalo	9
. Tulungagung	1
. Semarang	2
. Kendal	2
. Belitung	2
	3
Total	46

Sumber: Hasil pengolahan data 2018

3.2 Deskripsi Poin-poin Indikator Pendapat

1) 3.2.1 NSPK

Berikut diuraikan deskripsi dari setiap indikator pendapat dari 46 responden terkait dengan NSPK.

Tabel 5 Pemahaman mengenai Konsep Rencana Umum & Rinci Tata Ruang

Pemahaman	Jumlah	Persentase
Paham	38	82.6
Tidak paham	8	17.4
Total	46	100,0

Sumber: Hasil pengolahan data 2018

Pemahaman responden tentang konsep umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang menunjukkan bahwa sebanyak 38 (82,6%) responden sudah menyatakan memahami konsep umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang, sedangkan sisanya 8 (17,4%) responden menyatakan belum memahami.

Tabel 6

Pemahaman mengenai Kedudukan dan Fungsi RTR KSP/KSK

Pemahaman	Jumlah	Persentase
Paham	28	60.9
Tidak paham	18	39.1
Total	46	100,0

Sumber: Hasil pengolahan data 2018

Pemahaman responden tentang Kedudukan dan Fungsi RTR KSP/KSK menunjukkan bahwa sebanyak 28 (60,9%) responden menyatakan sudah memahami kedudukan dan fungsi dari rencana tata ruang kawasan strategis

(provinsi/kabupaten/ kota) dalam penyelenggaraan penataan ruang, sedangkan sisanya 18 (39,1%) responden menyatakan belum memahami.

Tabel 7

Pemahaman mengenai adanya Peraturan Perundangan tentang RTR KSP/KSK

Pemahaman	Jumlah	Persentase
Paham	32	69.6
Tidak paham	14	30.4
Total	46	100,0

Sumber: Hasil pengolahan data 2018

Pemahaman responden tentang Peraturan Perundang-undangan tentang RTR KSP/KSK menunjukkan bahwa sebanyak 32 (69,6%) responden menyatakan sudah memahami adanya Peraturan Perundangan tentang rencana tata ruang kawasan strategis (provinsi/kabupaten/kota) dalam penyelenggaraan penataan ruang, sedangkan sisanya 14 (30,4%) responden menyatakan belum memahami.

Hasil dari pemahaman pendapat responden ditindaklanjuti dengan uji nilai dengan melakukan pertanyaan konfirmatif. Hasil uji nilai rata-rata responden adalah 80,5 artinya responden paham tentang adanya Peraturan Perundang-undangan tentang RTR KSP/KSK

Tabel 8

Pemahaman mengenai Pengertian Kawasan Strategis

Pemahaman	Jumlah	Persentase
Paham	34	73.9

Tidak paham	12	26.1
Total	46	100,0

Sumber: Hasil pengolahan data 2018

Pemahaman responden mengenai kawasan strategis Provinsi/Kabupaten (KSP/KSK) menunjukkan bahwa sebanyak 34 (73,9%) responden menyatakan sudah memahami mengenai pengertian kawasan strategis Provinsi/Kabupaten, sedangkan sisanya 12 (26,1%) responden menyatakan belum memahami.

Tabel 9

Pemahaman mengenai Kriteria Nilai Strategis dalam Penetapan KSP/KSK

Pemahaman	Jumlah	Persentase
Paham	23	50.0
Tidak paham	23	50.0
Total	46	100,0

Sumber: Hasil pengolahan data 2018

Pemahaman responden mengenai Kriteria Nilai Strategis dalam Penetapan kawasan strategis Provinsi/Kabupaten (KSP/KSK) menunjukkan bahwa sebanyak 23 (50,0%) responden atau setengahnya

menyatakan sudah memahami mengenai Kriteria Nilai Strategis dalam Penetapan kawasan strategis Provinsi/Kabupaten (KSP/KSK), dan setengahnya lagi yaitu sebanyak 23 (50,0%) responden menyatakan belum sepenuhnya memahami.

Tabel 10

Pemahaman mengenai Peran Kawasan Strategis (Provinsi/Kabupaten) dalam Pengembangan dan/atau Konservasi Wilayah

Pemahaman	Jumlah	Persentase
Paham	27	58.7
Tidak paham	19	41.3
Total	46	100,0

Sumber: Hasil pengolahan data 2018

Sebanyak 27 (58,7%) responden menyatakan sudah memahami Peran Kawasan Strategis (Provinsi/ Kabupaten) dalam Pengembangan dan/atau Konservasi Wilayah, sedangkan, sedangkan sisanya 19 (41,3%) responden menyatakan belum sepenuhnya memahami.

Tabel 11

Kemampuan Menyusun Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis

Kemampuan	Jumlah	Persentase
Mampu	16	34.8
Tidak mampu	30	65.2
Total	46	100,0

Sumber: Hasil pengolahan data 2018

Sebanyak 16 (34,8%) responden menyatakan memiliki kemampuan menyusun rencana tata ruang Kawasan Strategis (Provinsi/Kabupaten), sedangkan, sedangkan selebihnya 30 (65,2%) responden menyatakan belum sepenuhnya memiliki kemampuan tersebut.

Tabel 12
 Pemahaman tentang tahapan penyusunan rencana tata ruang KSP/KSK

Pemahaman n	Jumlah	Persentase
Paham	19	41.3
Tidak paham	27	58.7
Total	46	100,0

Sumber: Hasil pengolahan data 2018

Sebanyak 19 (41,3%) responden menyatakan sudah memahami tahapan penyusunan rencana tata ruang Kawasan Strategis (Provinsi/Kabupaten), sedangkan, sedangkan selebihnya 27 (58,7%) responden menyatakan belum sepenuhnya memahami hal tersebut.

Hasil dari pemahaman pendapat responden ditindaklanjuti dengan uji nilai dengan melakukan pertanyaan konfirmatif. Hasil uji nilai rata-rata responden adalah 63,4%

Artinya responden mengerti tentang tahapan penyusunan rencana tata ruang KSP/KSK

Tabel 13
 Pemahaman tentang tipologi KSP/KSK

Pemahaman n	Jumlah	Persentase
Paham	22	47.8
Tidak paham	24	52.2
Total	46	100,0

Sumber: Hasil pengolahan data 2018

Sebanyak 22 (47,8%) responden menyatakan sudah memahami tipologi Kawasan Strategis (Provinsi/ Kabupaten), sedangkan, sedangkan selebihnya 24 (52,2%) responden menyatakan belum sepenuhnya memahami hal tersebut.

Hasil dari pemahaman pendapat responden ditindaklanjuti dengan uji nilai dengan melakukan pertanyaan konfirmatif. Hasil uji nilai rata-rata responden adalah 68,6% artinya responden paham tentang tipologi KSP/KSK.

Tabel 14
 Pemahaman tentang cara menentukan deliniasi KSP/KSK

Pemahaman	Jumlah	Persentase
Paham	21	45.7
Tidak paham	25	54.3
Total	46	100,0

Sumber: Hasil pengolahan data 2018

Sebanyak 21 (45,7%) responden menyatakan sudah memahami cara menentukan deliniasi Kawasan Strategis (Provinsi/Kabupaten), sedangkan, sedangkan selebihnya 25 (54,3%) responden menyatakan belum sepenuhnya memahami hal tersebut.

Hasil dari pemahaman pendapat responden ditindaklanjuti dengan uji nilai dengan melakukan pertanyaan konfirmatif. Hasil uji nilai rata-rata responden adalah 84,2%

Artinya responden paham tentang cara menentukan deliniasi KSP/KSK

Tabel 15
 Pemahaman tentang skala ketelitian peta rencana tata ruang KSP/KSK

Pemahaman n	Jumlah	Persentase
Paham	25	54.3
Tidak paham	21	45.7
Total	46	100,0

Sumber: Hasil pengolahan data 2018

Sebanyak 25 (54,3%) responden menyatakan sudah memahami skala ketelitian peta rencana

tata ruang Kawasan Strategis (Provinsi/Kabupaten), sedangkan, sedangkan sisanya 21 (45,7%) responden menyatakan belum sepenuhnya memahami hal tersebut. Hasil dari pemahaman pendapat responden ditindaklanjuti dengan uji nilai dengan melakukan pertanyaan konfirmatif. Hasil uji nilai rata-rata responden adalah 67 Artinya 67% responden paham tentang skala ketelitian peta rencana tata ruang KSP/KSK

Tabel 16
 Pemahaman tentang muatan rencana tata ruang KSP/KSK

Pemahaman n	Jumlah	Persentase
Paham	21	45.7
Tidak paham	25	54.3
Total	46	100,0

Sumber: Hasil pengolahan data 2018

Sebanyak 21 (45,7%) responden menyatakan sudah memahami muatan rencana tata ruang Kawasan Strategis (Provinsi/Kabupaten), sedangkan, sedangkan selebihnya 25 (54,3%) responden menyatakan belum sepenuhnya memahami hal tersebut. Hasil dari pemahaman pendapat responden ditindaklanjuti dengan uji nilai dengan melakukan pertanyaan konfirmatif. Hasil uji nilai rata-rata responden adalah 68,4 artinya 68,4 % responden paham tentang muatan rencana Tata Ruang

Tabel 17
 Pemahaman tentang masa berlaku rencana tata ruang KSP/KSK

Pemahaman n	Jumlah	Persentase
Paham	31	67.4
Tidak paham	15	32.6
Total	46	100,0

Sumber: Hasil pengolahan data 2018

Sebanyak 31 (67,4%) responden menyatakan sudah memahami muatan rencana tata ruang Kawasan Strategis (Provinsi/Kabupaten), sedangkan sisanya 15 (32,6%) responden menyatakan belum sepenuhnya memahami hal tersebut.

Data hasil survey menggambarkan bahwa secara umum responden sudah memahami tentang norma, standar, pedoman dan kriteria untuk semua komponen yaitu, Pemahaman mengenai adanya Peraturan Perundangan tentang RTR KSP/KSK, Pengertian Kawasan Strategis, Kriteria Nilai Strategis dalam Penetapan KSP/KSK, Peran Kawasan Strategis (Provinsi/Kabupaten) dalam Pengembangan dan/atau Konservasi Wilayah, Kemampuan Menyusun Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis, tahapan penyusunan rencana tata ruang KSP/KSK, tipologi KSP/KSK, menentukan deliniasi KSP/KSK, skala ketelitian peta rencana tata ruang KSP/KSK, muatan rencana tata ruang KSP/KSK, masa berlaku rencana tata ruang KSP/KSK dengan angka rata-rata 56,36% mendekati target untuk pemahaman NSPK adalah 60%

2) 3.2.2 RTRWN

Berikut diuraikan deskripsi dari setiap indikator pendapat dari 46 responden terkait dengan RTRWN.

Tabel 18

Pemahaman tentang adanya perubahan Peraturan Pemerintah tentang RTRWN

Pemahaman	Jumlah	Persentase
Paham	28	60.9
Tidak paham	18	39.1
Total	46	100,0

Sumber: Hasil Pengolahan data 2018

Sebanyak 28 (60,9%) responden menyatakan sudah memahami tentang adanya perubahan Peraturan Pemerintah tentang RTRWN, sedangkan, sisanya 18 (39,1%) responden menyatakan belum sepenuhnya memahami hal tersebut.

Tabel 19

Pemahaman tentang RTRWN

Pemahaman	Jumlah	Persentase
Paham	31	67.4
Tidak paham	15	32.6
Total	46	100,0

Sumber: Hasil pengolahan data 2018

Sebanyak 31 (67,4%) responden menyatakan sudah memahami tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), sedangkan, sisanya 15 (32,6%) responden menyatakan belum sepenuhnya memahami hal tersebut.

Tabel 20

Pemahaman mengenai muatan dari RTRWN

Pemahaman	Jumlah	Persentase
Paham	23	50.0
Tidak paham	23	50.0
Total	46	100,0

Sumber: Hasil pengolahan data 2018

Pemahaman responden mengenai muatan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) menunjukkan bahwa sebanyak 23 (50,0%) responden atau setengahnya menyatakan sudah memahami hal tersebut, dan setengahnya lagi yaitu sebanyak 23 (50,0%) responden menyatakan belum sepenuhnya memahami.

Hasil dari pemahaman pendapat responden ditindaklanjuti dengan uji nilai dengan melakukan pertanyaan konfirmatif. Hasil uji nilai rata-rata responden adalah 68,3 artinya sebanyak 68,3 responden mengerti mengenai muatan dari RTRWN.

Tabel 21

Pemahaman mengenai perubahan muatan dari RTRWN berdasarkan Peraturan Pemerintah terbaru

Pemahaman	Jumlah	Persentase
Paham	18	39.1
Tidak paham	28	60.9
Total	46	100,0

Sumber: Hasil pengolahan data 2018

Pemahaman responden mengenai perubahan muatan dari Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) berdasarkan Peraturan

Pemerintah terbaru menunjukkan bahwa sebanyak 18 (39,1%) responden menyatakan sudah memahami hal tersebut, dan selebihnya sebanyak 28 (60,9%) responden menyatakan belum sepenuhnya memahami.

Hasil dari pemahaman pendapat responden ditindaklanjuti dengan uji nilai dengan melakukan pertanyaan konfirmatif. Hasil uji nilai rata-rata responden adalah 76,3 artinya 76,3% responden memahami perubahan muatan dari RTRWN berdasarkan Peraturan Pemerintah terbaru.

Tabel 22

Perhatian terhadap arahan RTRWN dalam menyusun RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota

Perhatian	Jumlah	Persentase
Memperhatikan	35	76.1
Tidak memperhatikan	11	23.9
Total	46	100,0

Sumber: Hasil pengolahan data 2018

Perhatian responden terhadap arahan RTRWN dalam menyusun RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota menunjukkan bahwa sebanyak 35 (76,1%) responden menyatakan sudah memahami hal tersebut, dan sisanya sebanyak 11 (23,9%) responden menyatakan belum sepenuhnya memperhatikan hal tersebut.

Tabel 23

Konsultasi ke Pemerintah Pusat tentang RTRWN

Konsultasi	Jumlah	Persentase
Melakukan	38	82.6
Tidak melakukan	8	17.4
Total	46	100,0

Sumber: Hasil pengolahan data 2018

Upaya responden untuk melakukan konsultasi ke Pemerintah Pusat tentang RTRWN dalam menyusun rencana tata ruang baik RTRW maupun RTR rinci

Provinsi/Kabupaten/Kota menunjukkan bahwa sebanyak 38 (82,6%) responden menyatakan berupaya untuk itu, dan sisanya sebanyak 8 (17,4%) responden menyatakan belum sepenuhnya berupaya untuk itu.

Data yang diambil dari hasil survey dapat menggambarkan bahwa secara umum responden sudah memahami tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional untuk komponen-komponen perhatian terhadap arahan RTRWN dalam menyusun RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota, perubahan muatan dari RTRWN berdasarkan Peraturan Pemerintah terbaru, muatan dari RTRWN, adanya perubahan Peraturan Pemerintah tentang RTRWN, dengan angka rata-rata 62,7%.

3) 3.2.3 RTR Pulau/Kepulauan

Berikut diuraikan deskripsi dari setiap indikator pendapat dari 46 responden terkait dengan RTR Pulau/Kepulauan.

Tabel 24

Pemahaman mengenai Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan

Pemahaman	Jumlah	Persentase
n		
Paham	16	34.8
Tidak paham	30	65.2
Total	46	100,0

Sumber: Hasil pengolahan data 2018

Pemahaman responden mengenai Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan menunjukkan bahwa sebanyak 16 (34,8%) responden menyatakan

sudah memahami hal tersebut dengan jelas, sedangkan selebihnya sebanyak 30 (65,2%) responden menyatakan belum sepenuhnya memahami hal tersebut dengan jelas.

Tabel 25

Pemahaman mengenai bentuk legal aspek penetapan

Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan

Pemahaman	Jumlah	Persentase
Paham	18	39.1
Tidak paham	28	60.9
Total	46	100,0

Sumber: Hasil pengolahan data 2018

Pemahaman responden mengenai bentuk legal aspek penetapan Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan menunjukkan bahwa sebanyak 18 (39,1%) responden menyatakan sudah memahami hal tersebut dengan jelas, sedangkan selebihnya sebanyak 28 (60,9%) responden menyatakan belum sepenuhnya memahami hal tersebut dengan jelas.

Hasil dari pemahaman pendapat responden ditindaklanjuti dengan uji nilai dengan melakukan pertanyaan konfirmatif. Hasil uji nilai rata-rata responden adalah 36,5

Artinya responden tidak paham mengenai bentuk legal aspek penetapan Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan.

Tabel 26

Pemahaman mengenai peran dan fungsi dari Rencana

Tata Ruang Pulau/Kepulauan

Pemahaman	Jumlah	Persentase
Paham	16	34.8
Tidak paham	30	65.2
Total	46	100,0

Sumber: Hasil pengolahan data 2018

Pemahaman responden mengenai peran dan fungsi dari Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan menunjukkan bahwa sebanyak 16 (34,8%) responden menyatakan sudah memahami hal tersebut dengan jelas, sedangkan selebihnya sebanyak 30 (65,2%) responden menyatakan belum sepenuhnya memahami hal tersebut dengan jelas.

Tabel 27

Pemahaman mengenai Muatan dari Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan

Pemahaman	Jumlah	Persentase
Paham	15	32.6
Tidak paham	31	67.4
Total	46	100,0

Sumber: Hasil pengolahan data 2018

Pemahaman responden mengenai muatan dari Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan menunjukkan bahwa sebanyak 15 (32,8%) responden menyatakan sudah memahami hal tersebut dengan jelas, sedangkan selebihnya sebanyak 31 (67,4%) responden menyatakan belum sepenuhnya memahami hal tersebut dengan jelas.

Hasil dari pemahaman pendapat responden ditindaklanjuti dengan uji nilai dengan melakukan pertanyaan konfirmatif. Hasil uji nilai rata-rata responden adalah 66,4 artinya 66,4 responden paham mengenai muatan dari Rencana Tata Ruang Pulau/ Kepulauan

Data yang diambil dari hasil survey dapat menggambarkan bahwa secara umum responden belum memahami tentang Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan dengan komponen-komponen muatan dari Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan, peran dan fungsi dari Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan, bentuk

legal aspek penetapan Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan, dengan angka rata-rata pemahaman RTR Pulau Kepulauan 35,33%.

4) 3.2.4 RTR Kawasan Strategis Nasional (KSN)

Berikut diuraikan deskripsi dari setiap indikator pendapat dari 46 responden terkait dengan Kawasan Strategis Nasional (KSN).

Tabel 28
 Pemahaman mengenai RTR
 Kawasan Strategis Nasional

Pemahaman	Jumlah	Persentase
Paham	24	52.2
Tidak paham	22	47.8
Total	46	100,0

Sumber: Hasil pengolahan data 2018

Pemahaman responden mengenai Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional menunjukkan bahwa sebanyak 24 (52,2%) responden menyatakan sudah memahami hal tersebut dengan jelas, sedangkan sisanya sebanyak 22 (47,8%) responden menyatakan belum sepenuhnya memahami hal tersebut dengan jelas.

Hasil dari pemahaman pendapat responden ditindaklanjuti dengan uji nilai dengan melakukan pertanyaan konfirmatif. Hasil uji nilai rata-rata responden adalah 84 artinya 84% responden paham mengenai RTR Kawasan Strategis Nasional

Tabel 29
 Pemahaman mengenai Konsep Penetapan
 Kawasan Strategis Nasional

Pemahaman	Jumlah	Persentase
Paham	18	39.1
Tidak paham	28	60.9
Total	46	100,0

Sumber: Hasil pengolahan data 2018

Pemahaman responden mengenai Konsep Penetapan Kawasan Strategis Nasional menunjukkan bahwa sebanyak 18 (39,1%) responden menyatakan sudah memahami hal tersebut dengan benar, sedangkan selebihnya sebanyak 28 (60,9%) responden menyatakan belum sepenuhnya memahami hal tersebut dengan benar.

Hasil dari pemahaman pendapat responden ditindaklanjuti dengan uji nilai dengan melakukan pertanyaan konfirmatif. Hasil uji nilai rata-rata responden adalah 55 artinya responden paham mengenai konsep penetapan Kawasan Strategis Nasional.

Tabel 30

Pemahaman mengenai muatan pengaturan dalam Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional

Pemahaman	Jumlah	Persentase
Paham	17	37.0
Tidak paham	29	63.0
Total	46	100,0

Sumber: Hasil pengolahan data 2018

Pemahaman responden mengenai muatan pengaturan dalam Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional menunjukkan bahwa sebanyak 17 (37,0%) responden menyatakan sudah memahami hal tersebut dengan benar, sedangkan selebihnya sebanyak 29 (63,0%) responden menyatakan belum sepenuhnya memahami hal tersebut dengan benar.

Hasil dari pemahaman pendapat responden ditindaklanjuti dengan uji nilai dengan melakukan pertanyaan konfirmatif. Hasil uji nilai rata-rata responden adalah 81,5 artinya

responden paham mengenai muatan pengaturan dalam Rencana Tata Ruang KSN.

Tabel 31

Pemahaman mengenai Peran dan Fungsi dari Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional

Pemahaman	Jumlah	Persentase
Paham	22	47.8
Tidak paham	24	52.2
Total	46	100,0

Sumber: Hasil pengolahan data 2018

Pemahaman responden mengenai peran dan fungsi dari Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional menunjukkan bahwa sebanyak 22 (47,8%) responden menyatakan sudah memahami hal tersebut dengan benar, sedangkan selebihnya sebanyak 24 (52,2%) responden menyatakan belum sepenuhnya memahami hal tersebut dengan benar.

Tabel 32

Pemahaman mengenai Muatan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional

Pemahaman	Jumlah	Persentase
Paham	18	39.1
Tidak paham	28	60.9
Total	46	100,0

Sumber: Hasil pengolahan data 2018

Pemahaman responden mengenai muatan dari Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional menunjukkan bahwa sebanyak 18 (39,1%) responden menyatakan sudah memahami hal tersebut dengan benar, sedangkan selebihnya sebanyak 28 (60,9%) responden menyatakan belum sepenuhnya memahami hal tersebut dengan benar.

Hasil dari pemahaman pendapat responden ditindaklanjuti

dengan uji nilai dengan melakukan pertanyaan konfirmatif. Hasil uji nilai rata-rata responden adalah 78.8 artinya responden memahami tentang muatan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional.

Data yang diambil dari hasil survey dapat menggambarkan bahwa secara umum responden belum memahami tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional pada komponen-komponen Muatan Rencana Tata Ruang, Kawasan Strategis Nasional, Peran dan Fungsi dari Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional, muatan pengaturan dalam Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional, Konsep Penetapan Kawasan Strategis Nasional, dengan angka rata-rata 43,4% yang masih di bawah 50%.

5) 3.2.5 Sistem Informasi Tata Ruang Nasional (SITARUNAS)

Berikut diuraikan deskripsi dari setiap indikator pendapat dari 46 responden terkait dengan Sistem Informasi Tata Ruang Nasional (SITARUNAS).

Tabel 33

Pemahaman mengenai Aplikasi Sistem Informasi Tata Ruang Nasional

Pemahaman	Jumlah	Persentase
Paham	15	32.6
Tidak paham	31	67.4
Total	46	100,0

Sumber: Hasil pengolahan data 2018

Pemahaman responden mengenai Aplikasi Sistem Informasi Tata Ruang Nasional menunjukkan bahwa sebanyak 15 (39,1%) responden menyatakan sudah memahami hal tersebut dengan benar, sedangkan selebihnya

sebanyak 31 (67,4%) responden menyatakan belum sepenuhnya memahami hal tersebut dengan benar.

Tabel 34

Pemahaman mengenai Konten Aplikasi Sistem Informasi Tata Ruang Nasional (SITARUNAS)

Pemahaman	Jumlah	Persentase
Paham	10	21,7
Tidak paham	36	78,3
Total	46	100,0

Sumber: Hasil pengolahan data 2018

Pemahaman responden mengenai konten Aplikasi Sistem Informasi Tata Ruang Nasional (SITARUNAS) menunjukkan bahwa hanya sebanyak 10 (21,7%) responden menyatakan sudah memahami hal tersebut dengan benar, sedangkan selebihnya sebanyak 36 (78,3%) responden menyatakan belum sepenuhnya memahami hal tersebut dengan benar.

Hasil dari pemahaman pendapat responden ditindaklanjuti dengan uji nilai dengan melakukan pertanyaan konfirmatif. Hasil uji nilai rata-rata responden adalah 86,75 artinya responden paham mengenai konten aplikasi Sistem Informasi Tata Ruang Nasional.

Data yang diambil dari hasil survey dapat menggambarkan bahwa secara umum responden sudah mengetahui tentang aplikasi Sistem Informasi Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dengan angka rata-rata 86,75%.

3.4 Deskripsi Poin-poin Indikator Essay

Hasil wawancara ini bertujuan untuk mengetahui pendapat responden mengenai kinerja dan kualitas dari RTRWN, NSPK, RTR Pulau/Kepulauan, RTR KSN dan RDTR KPN

yang telah di lakukan oleh Pemerintah Pusat dalam mendukung rencana tata ruang di Provinsi dan Kabupaten.

6) 3.4.1 Tingkat Penggunaan NSPK

Berikut ini disajikan mengenai rekapitulasi tanggapan responden terhadap pertanyaan berkaitan

dengan Acuan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN No. 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan RTR KSP dan KSK dalam Penyusunan RTR.

Tabel 4

Acuan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN No. 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan RTR KSP dan KSK dalam Penyusunan RTR

No	Tanggapan	Jumlah	Persentase (%)
1.	Tidak Paham	2	4,3
2.	Ya	44	95,7
	Total	46	100,0

Sumber: Hasil pengolahan data 2018

Hasil rekapitulasi berdasarkan tanggapan responden (n=46) terhadap pertanyaan berkaitan dengan Acuan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN No. 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan RTR KSP dan KSK dalam Penyusunan RTR, dapat diketahui bahwa mayoritas tanggapan menyatakan Ya (69,6%), dan masih ada yang menyatakan Tidak Paham (4,3%). Hasil ini menunjukkan bahwa secara umum Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN No. 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan RTR KSP dan KSK sudah menjadi acuan yang baik dalam Penyusunan RTR, meskipun masih diperlukan tambahan dan penjelasan lebih rinci, terutama berkaitan

dengan Struktur Ruang dan Rencana Pola Ruang.

2. Apakah Anda memiliki saran atau masukan mengenai Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN No. 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan RTR KSP/KSK?

Tabel 41 Saran atau Masukan mengenai Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN No. 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan RTR KSP/KSK?

No.	Tanggapan	Jumlah	Persentase (%)
1.	Perlu penjelasan	24	52,2
2.	Perlu sosialisasi	5	10,9
3.	Sudah cukup	17	37,0
	Total	46	100,0

Sumber: Hasil pengolahan data 2018

Hasil rekapitulasi berdasarkan tanggapan responden (n=46) terhadap pertanyaan berkaitan dengan saran terhadap Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN No. 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan RTR KSP/KSK, dapat diketahui bahwa mayoritas tanggapan menyatakan perlu penjelasan (52,2), dan perlu sosialisasi (10,9), meskipun terdapat juga responden yang menyatakan sudah cukup (37,0%). Hasil ini menunjukkan bahwa secara umum Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN No. 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan RTR KSP dan KSK sudah menjadi acuan yang baik dalam Penyusunan RTR.

Saran-saran dan masukan yang diajukan oleh responden terhadap Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN No. 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan RTR KSP/KSK berkaitan dengan adanya acuan dominasi fungsi

peruntukan kawasan, perlunya diatur terkait KSP lintas provinsi dan KSK lintas kabupaten, sosialisasi ke tingkat pemerintah daerah kota/kabupaten, mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan daerah, penyusunan KSP dan KAK ditempatkan sesuai fungsinya sebagai arahan sehingga tidak perlu rinci khususnya untuk skala peta, dan penjelasan berkaitan dengan ketentuan pada muatan struktur ruang dan rencana pola ruang.

3. Adakah RTR KSP/KSK yang sudah Perda? (jika ada lanjut pertanyaan no 4)

Tabel 42 Keberadaan RTR KSP/KSK yang sudah Perda

No.	Tanggapan	Jumlah	Persentase (%)
1.	Ada	11	23,9
2.	Tidak	35	76,1
	Total	46	100,0

Sumber: Hasil pengolahan data 2018

Hasil rekapitulasi berdasarkan tanggapan responden (n=46) terhadap pertanyaan berkaitan dengan keberadaan RTR KSP/KSK yang sudah Perda, dapat diketahui bahwa mayoritas tanggapan responden menyatakan tidak ada (76,1), meskipun terdapat juga responden yang menyatakan ada (23,9%). Hasil ini menunjukkan bahwa secara umum belum ada RTR KSP/KSK yang sudah ditindaklanjuti dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota/Kabupaten.

4. Apa perbedaan muatan RTR KSP/KSK yang menggunakan Permen ATR/BPN No.37/2016 tentang Pedoman Penyusunan RTR KSP/KSK dan yang tidak menggunakan Permen tersebut? (jika ada, Sebutkan!)

Tabel 43 Perbedaan muatan RTR KSP/KSK menggunakan Permen ATR/BPN No.37/2016 tentang Pedoman Penyusunan RTR KSP/KSK dengan Peraturan Lain

No.	Tanggapan	Jumlah	Persentase (%)
1.	Kurang paham	36	78,3
2.	Terdapat perbedaan	3	6,5
3.	Tidak ada	7	15,2
	Total	46	100,0

Sumber: Hasil pengolahan data 2018

Rekapitulasi berdasarkan tanggapan responden (n=46) terhadap pertanyaan berkaitan dengan Perbedaan muatan RTR KSP/KSK menggunakan Permen ATR/BPN No. 37/2016 tentang Pedoman Penyusunan RTR KSP/KSK dengan Peraturan Lain, dapat diketahui bahwa mayoritas tanggapan responden menyatakan kurang paham (76,1), meskipun terdapat juga responden yang menyatakan terdapat perbedaan (6,5%) dan tidak ada perbedaan (15,2%). Hasil ini menunjukkan bahwa secara umum responden kurang paham terhadap Perbedaan muatan RTR KSP/KSK menggunakan Permen ATR/BPN No. 37/2016 tentang Pedoman Penyusunan RTR KSP/KSK dengan peraturan lain. Salah satu perbedaannya berkaitan dengan kedetailannya yang lebih fokus pada nilai strategis kawasan, dan kerincian penyusunannya.

Data yang diambil dari hasil survey dapat menggambarkan bahwa secara umum responden sudah menggunakan NSPK dengan angka rata-rata 95,7% dari target penggunaan NSPK sebesar 90%, namun masih ada yang harus mendapat perhatian khusus mengenai keberadaan RTR KSP/KSK yang sudah menjadi Perda.

Saran responden terhadap NSPK

1. Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN No. 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan RTR KSP dan KSK sudah menjadi acuan yang baik dalam Penyusunan RTR, meskipun masih diperlukan tambahan dan penjelasan lebih rinci, terutama berkaitan dengan Struktur Ruang dan Rencana Pola Ruang.
2. Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN No. 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan RTR KSP dan KSK sudah menjadi acuan yang baik dalam Penyusunan RTR. Saran-saran dan masukan yang diajukan oleh responden terhadap Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN No. 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan RTR KSP/KSK berkaitan dengan adanya acuan dominasi fungsi peruntukan kawasan, perlunya diatur terkait KSP lintas provinsi dan KSK lintas kabupaten, sosialisasi ke tingkat pemerintah daerah kota/kabupaten, mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan daerah, penyusunan KSP dan KAK ditempatkan sesuai fungsinya sebagai arahan sehingga tidak perlu rinci khususnya untuk skala peta, dan penjelasan berkaitan dengan ketentuan pada muatan struktur ruang dan rencana pola ruang.
3. Sebagian respondennya menyatakan bahwa sosialisasi PERMEN 37 yang dilakukan pemerintah pusat tidak dirasakan oleh pemerintah daerah.
4. Mayoritas tanggapan responden menyatakan belum menyusun (43,5%), meskipun terdapat juga responden yang menyatakan *sudah menyusun* (56,5%) namun masih terkendala dan Stakeholder yang dilibatkan dalam penyusunan RTR KSP/KSK terdiri dari pihak akademis, masyarakat, BPN/ATR dan

pemerintah daerah dalam bentuk FGD, serta SKPD terkait melalui rapat TKPRD.

5. Mayoritas tanggapan responden menyatakan belum menyusun (45,7%), meskipun terdapat responden yang

sudah menyusun namun masih menemui kendala pada pemetaan (21,7%) dan data dan informasi (15,2%) dalam Penyusunan RTR KSP/KSK. Kendala-kendala yang dijumpai dalam kegiatan RTR KSP/KSK terdiri dari kurangnya data, kurangnya waktu pelaksanaan, asistensi yang berulang, data dan informasi lahan serta izin lokasi, peta dasar 1:25.000 dan 1:50.000, pemetaan, ketersediaan data yang sulit dijangkau transportasi, penyusunan peta, kurangnya pemahaman tentang muatan, informasi dan data dari stakeholder terkait, kepemilikan lahan di kawasan, konflik dengan masyarakat dan lingkungan, kurangnya fasilitas pendukung dan SDM yang optimal, asistensi BIG yang berulang dan kurang anggaran, SDM bidang pemetaan, proses asistensi yang harus menunggu jadwal yang ditetapkan, anggaran asistensi ke ATR, penentuan deliniasi, tidak adanya data sektoral yang memadai untuk dilakukan analisis, pemahaman RTR KSP/KSK antar sektor yang tidak sama, peran serta para stakeholder yang belum maksimal, perubahan batas teritorial dan batas daerah, menterjemahkan kawasan inti dan kawasan penyangga pada saat memasuki rencana struktur ruang.

6. Secara umum responden merasa tidak ada Langkah/tindakan yang dilakukan untuk Mengatasi Kendala dalam Penyusunan RTR KSP/KSK. Langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam mengatasi kendala dalam penyusunan RTR KSP/KSK yaitu terdiri dari

koordinasi dengan pemerintah daerah, permohonan percepatan ke BIG dengan bantuan ATR, mengusulkan update data tata ruang dan penambahan waktu penyusunan, survei yang dilakukan baik untuk memperoleh data primer maupun sekunder, menunggu hasil revisi RTRW, berkonsultasi dengan pihak kementerian ATR, dibentuknya TIM revitalisasi, sosialisasi tujuan dilakukannya RTR, dilakukannya diklat dan atau sosialisasi cara penyusunan RTR KSP/KSK, melibatkan konsultan independen berkaitan dengan asistensi peta di BIG yang lokasinya ditempatkan di dekat kantor BIG, membuat kesepakatan dari hasil pertemuan dengan para stakeholder terkait, melakukan konsultasi secara intensif, merancang suatu pedoman yang mengacu pada Permen 27/2016 dan 20/2011 serta pedoman lainnya yang dapat menyesuaikan kondisi dan karakter KSP/KSK.

7) **3.4.2 Jumlah Pemda Yang Tidak Berkonsultasi**

1. Pernahkah Anda berkonsultasi dengan pihak penyusun Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN No. 37 Tahun 2016 mengenai tata cara penyusunan kawasan strategis (provinsi/kabupaten)?

Tabel 44 Berkonsultasi dengan Pihak Penyusun Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN No. 37 Tahun 2016 mengenai Tata Cara Penyusunan Kawasan Strategis (provinsi/kabupaten)

No.	Tanggapan	Jumlah	Persentase (%)
1.	Kurang paham	36	78,3
2.	Terdapat perbedaan	3	6,5
3.	Tidak ada	7	15,2

	Total	46	100,0
--	--------------	-----------	--------------

Sumber: Hasil pengolahan data 2018

Hasil rekapitulasi berdasarkan tanggapan responden (n=46) terhadap pertanyaan berkaitan dengan Berkonsultasi dengan pihak penyusun Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN No. 37 Tahun 2016 mengenai Tata Cara Penyusunan Kawasan Strategis (provinsi/kabupaten), dapat diketahui bahwa mayoritas tanggapan responden menyatakan kurang paham (78,3%), meskipun terdapat juga responden yang menyatakan terdapat perbedaan (6,5%) dan tidak ada perbedaan (15,2%). Hasil ini menunjukkan bahwa secara umum responden kurang paham terhadap berkonsultasi dengan pihak Penyusun Peraturan Menteri ATR/BPN No. 37 Tahun 2016 mengenai Tata Cara Penyusunan Kawasan Strategis (provinsi/kabupaten).

2. Menurut Anda, apakah muatan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN No. 37 Tahun 2016 sudah cukup jelas? Apakah Peraturan Menteri tersebut memerlukan sosialisasi lebih lanjut?

Tabel 45 Kejelasan Muatan Peraturan Menteri ATR/ Kepala BPN No. 37 Tahun 2016

No.	Tanggapan	Jumlah	Persentase (%)
1.	Kurang paham	36	78,3
2.	Terdapat perbedaan	3	6,5
3.	Tidak ada	7	15,2
	Total	46	100,0

Sumber: Hasil pengolahan data 2018

Hasil rekapitulasi berdasarkan tanggapan responden (n=46) terhadap

pertanyaan berkaitan dengan Kejelasan Muatan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN No.37 Tahun 2016, dapat diketahui bahwa mayoritas tanggapan responden menyatakan kurang paham (78,3%), meskipun terdapat juga responden yang menyatakan terdapat perbedaan (6,5%) dan tidak ada perbedaan (15,2%). Hasil ini menunjukkan bahwa secara umum responden kurang paham terhadap kejelasan muatan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN No. 37 Tahun 2016.

Hasil ini memperlihatkan bahwa Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN No. 37 Tahun 2016 mengenai tata cara penyusunan kawasan strategis (provinsi/ kabupaten) perlu dilakukan sosialisasi lagi lebih lanjut.

3. Apakah pernah ada sosialisasi dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah daerah?

Tabel 46 Sosialisasi dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah daerah

No.	Tanggapan	Jumlah	Persentase (%)
1.	Kurang paham	36	78,3
2.	Terdapat perbedaan	3	6,5
3.	Tidak ada	7	15,2
	Total	46	100,0

Sumber: Hasil pengolahan data 2018

Hasil rekapitulasi berdasarkan tanggapan responden (n=46) terhadap pertanyaan berkaitan dengan Sosialisasi dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah, dapat diketahui bahwa mayoritas tanggapan responden menyatakan kurang paham (78,3%), meskipun terdapat juga responden yang menyatakan terdapat perbedaan (6,5%) dan tidak ada perbedaan (15,2%). Hasil ini menunjukkan bahwa secara umum

responden kurang paham terhadap Sosialisasi dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah daerah.

Hasil ini memperlihatkan bahwa secara umum sebagian respondennya menyatakan bahwa sosialisasi yang dilakukan pemerintah pusat tidak dirasakan oleh pemerintah daerah.

4. Apakah dalam penyusunan RTR KSP/KSK melibatkan segala pihak, stakeholder apa saja yang di libatkan? Dalam bentuk apa?

Tabel 47 Keterlibatan Stakeholders dalam Penyusunan RTR KSP/KSK

No .	Tanggapan	Jumlah	Persentase (%)
1.	Belum menyusun	20	43,5
2.	Ya	26	56,5
	Total	46	100,0

Sumber: Hasil pengolahan data 2018

Hasil rekapitulasi berdasarkan tanggapan responden (n=46) terhadap pertanyaan berkaitan dengan Keterlibatan Stakeholders dalam Penyusunan RTR KSP/KSK, dapat diketahui bahwa mayoritas tanggapan responden menyatakan belum menyusun (43,5%), meskipun terdapat juga responden yang menyatakan *ya menyusun* (56,5%). Hasil ini menunjukkan bahwa secara umum responden belum menyusun terhadap Keterlibatan stakeholders dalam Penyusunan RTR KSP/KSK.

Stakeholder yang dilibatkan dalam penyusunan RTR KSP/KSK terdiri dari pihak akademis, masyarakat, BPN/ATR dan pemerintah daerah dalam bentuk FGD, serta SKPD terkait melalui rapat TKPRD.

5. Dalam penyusunan RTR KSP/KSK terdapat kendala apa saja?

Tabel 48 Kendala dalam Penyusunan RTR KSP/KSK

No .	Tanggapan	Jumlah	Persentase (%)
1.	Belum menyusun	21	45,7
2.	Data dan informasi	7	15,2
3.	Kepemilikan lahan	2	4,3
4.	Pemahaman	1	2,2
5.	Pemetaan	10	21,7
6.	Peran serta stakeholder	1	2,2
7.	Tidak ada	4	8,7
	Total	46	100,0

Sumber: Hasil pengolahan data 2018

Hasil rekapitulasi berdasarkan tanggapan responden (n=46) terhadap pertanyaan berkaitan dengan Kendala dalam Penyusunan RTR KSP/KSK, dapat diketahui bahwa mayoritas tanggapan responden menyatakan belum menyusun (45,7%), meskipun terdapat responden yang sudah menyusun namun masih menemui kendala pada pemetaan (21,7%) dan data dan informasi (15,2%) dalam Penyusunan RTR KSP/KSK.

Kendala-kendala yang dijumpai dalam kegiatan RTR KSP/KSK terdiri dari kurangnya data, kurangnya waktu pelaksanaan, asistensi yang berulang, data dan informasi lahan serta izin lokasi, peta dasar 1:25.000 dan 1:50.000, pemetaan, ketersediaan data yang sulit dijangkau transportasi, penyusunan peta, kurangnya pemahaman tentang muatan, informasi dan data dari stakeholder terkait, kepemilikan lahan di kawasan, konflik dengan masyarakat dan lingkungan, kurangnya fasilitas pendukung dan SDM yang optimal, asistensi BIG yang berulang dan kurang anggaran, SDM

bidang pemetaan, proses asistensi yang harus menunggu jadwal yang ditetapkan, anggaran asistensi ke ATR, penentuan deliniasi, tidak adanya data sektoral yang memadai untuk dilakukan analisis, pemahaman RTR KSP/KSK antar sektor yang tidak sama, peran serta para stakeholder yang belum maksimal, perubahan batas teritorial dan batas daerah, menterkemahkan kawasan inti dan kawasan penyangga pada saat memasuki rencana struktur ruang.

6. Langkah/Tindakan apa saja yang sudah dilakukan untuk mengatasi kendala dalam penyusunan RTR KSP/KSK?

Tabel 49 Langkah/Tindakan yang Dilakukan untuk Mengatasi Kendala dalam Penyusunan RTR KSP/KSK

No .	Tanggapan	Jumlah	Persentase (%)
1.	Keberadaan BIG	3	6,5
2.	Koordinasi	15	32,6
3.	Pembaharuan data dan informasi	8	17,4
4.	Sosialisasi	2	4,3
5.	Tidak ada	18	39,1
	Total	46	100,0

Sumber: Hasil pengolahan data 2018

Hasil rekapitulasi berdasarkan tanggapan responden (n=46) terhadap pertanyaan berkaitan dengan Langkah/Tindakan yang Dilakukan untuk mengatasi Kendala dalam Penyusunan RTR KSP/KSK, dapat diketahui bahwa mayoritas tanggapan responden menyatakan Tidak ada Langkah/Tindakan (39,1%), meskipun terdapat juga responden yang menyatakan Koordinasi (32,6%) dan

Pembaharuan data dan informasi (17,4%). Hasil ini menunjukkan bahwa secara umum responden Tidak ada Langkah/tindakan yang dilakukan untuk Mengatasi Kendala dalam Penyusunan RTR KSP/KSK.

Langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam mengatasi kendala dalam penyusunan RTR KSP/KSK yaitu terdiri dari: koordinasi dengan pemerintah daerah, permohonan percepatan ke BIG dengan bantuan ATR, mengusulkan update data tata ruang dan penambahan waktu penyusunan, survei yang dilakukan baik untuk memperoleh data primer maupun sekunder, menunggu hasil revisi RTRW, berkonsultasi dengan pihak kementerian ATR, dibentuknya TIM revitalisasi, sosialisasi tujuan dilakukannya RTR, dilakukannya diklat dan atau sosialisasi cara penyusunan RTR KSP/KSK, melibatkan konsultan independen berkaitan dengan asistensi peta di BIG yang lokasinya ditempatkan di dekat kantor BIG, membuat kesepakatan dari hasil pertemuan dengan para stakeholder terkait, melakukan konsultasi secara intensif, merancang suatu pedoman yang mengacu pada Permen 27/2016 dan 20/2011 serta pedoman lainnya yang dapat menyesuaikan kondisi dan karakter KSP/KSK.

Data yang diambil dari hasil survey dapat menggambarkan bahwa secara umum responden tidak berkonsultasi dengan pihak Pusat dengan angka rata-rata

dibawah 50% jauh dari target untuk tingkat Pemda yang tidak berkonsultasi sebanyak 70%

8) 3.4.3 Tingkat Penggunaan RTRWN

1. Apakah RTRWN digunakan sebagai acuan dalam membuat Rencana Tata Ruang di Provinsi/Kab/Kota?

Tabel 50 RTRWN digunakan sebagai acuan dalam membuat Rencana Tata Ruang di Provinsi/Kab/Kota

No .	Tanggapan	Jumlah	Persentase (%)
1.	Jarang	1	2,2
2.	Ya	45	97,8
	Total	46	100,0

Sumber: Hasil pengolahan data 2018

Hasil rekapitulasi berdasarkan tanggapan responden (n=46) terhadap pertanyaan berkaitan dengan RTRWN digunakan sebagai acuan dalam membuat Rencana Tata Ruang di Provinsi/Kab/Kota, dapat diketahui bahwa mayoritas tanggapan responden menyatakan Ya (97,8%), meskipun terdapat juga responden yang menyatakan Jarang (2,2%). Hasil ini menunjukkan bahwa secara umum responden menggunakan RTRWN sebagai acuan dalam membuat Rencana Tata Ruang di Provinsi/Kab/Kota.

2. Sejauh mana arahan RTRWN digunakan sebagai acuan dalam menyusun Rencana Tata Ruang di Provinsi/ Kab/Kota?

Tabel 51 Arahan RTRWN sebagai Acuan dalam Menyusun Rencana Tata Ruang di Provinsi/Kab/Kota

No .	Tanggapan	Jumlah	Persentase (%)
1.	Arahan KSN	11	23,9
2.	Hierarki tata ruang	7	15,2
3.	Masih ada keraguan	9	19,6
4.	Penentuan KSP	10	21,7
5.	Sudah cukup	9	19,6
	Total	46	100,0

Sumber: Hasil pengolahan data 2018

Hasil rekapitulasi berdasarkan tanggapan responden (n=46) terhadap pertanyaan berkaitan dengan Arahan RTRWN sebagai Acuan dalam Menyusun Rencana Tata Ruang di Provinsi/Kab/Kota, dapat diketahui bahwa mayoritas tanggapan responden menyatakan Arahan KSN (23,9%), meskipun terdapat juga responden yang menyatakan Penentuan KSP (21,7%) Sudah Cukup dan Masih Ada Keraguan (19,6%). Hasil ini menunjukkan bahwa secara umum responden menyatakan Arahan KSN terhadap Arahan RTRWN sebagai Acuan dalam Menyusun Rencana Tata Ruang di Provinsi/Kab/ Kota.

Memperhatikan arahan KSN dalam perencanaan pusat kegiatan, dalam penentuan KSP, Terkait program serta penentuan PSN, KSN, stuktur ruang dan system perkotaan, rencana diakomodir, arahan RTRW Kota senantiasa melihat kebijakan nasional untuk dsingkronkan dengan program pembangunan kota/kabupaten, dalam proses penyusunan raperda dan materi teknis, Arahan dalam RTRWN dijadikan sebagai dasar awal atau acuan, penentuan arahan prioritas kebijakan nasional, kesesuaian

rencana pola ruang, kesesuaian dengan kondisi daerah, kesesuaian RTRW dengan RTRWN, acuan RTRWN yang harus dijadikan acuan, kebijakan struktur ruang dan kawasan yang diprioritaskan pada kawasan yang berkaitan dengan sistem nasional, proyek strategis nasional yang harus diakomodir dalam RTRWN Nasional, proyek strategis nasional harus diakomodir dalam RTRW Kabupaten/Kota, rencana struktur dan ketentuan-ketentuan yang ada diadopsi pada RTRWP, seluruh kebijakan

nasional tercantum dalam RTRW Kota, dan sesuai dengan hirarki struktur ruang.

3. Apakah pernah ada sosialisasi dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah daerah terkait RTRWN?

Tabel 52 Sosialisasi dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah terkait RTRWN

No.	Tanggapan	Jumlah	Persentase (%)
1.	Belum pernah	23	50,0
2.	Pernah	21	45,7
3.	Tidak tahu	2	4,3
	Total	46	100,0

Sumber: Hasil pengolahan data 2018

Hasil rekapitulasi berdasarkan tanggapan responden (n=46) terhadap pertanyaan berkaitan dengan Sosialisasi dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah terkait RTRWN, dapat diketahui bahwa mayoritas tanggapan responden menyatakan Belum pernah (50,0%), meskipun terdapat juga responden yang menyatakan Pernah (45,7%) dan tidak tahu (4,3%). Hasil ini menunjukkan bahwa secara umum responden belum pernah mengikuti sosialisasi dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah terkait RTRWN.

4. Apakah pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota dilibatkan dalam proses penyusunan/revisi RTRWN?

Tabel 53 Keterlibatan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota dalam Proses Penyusunan/Revisi RTRWN

No.	Tanggapan	Jumlah	Persentase (%)
-----	-----------	--------	----------------

1.	Belum pernah dilibatkan	25	54,3
2.	Ya	21	45,7
	Total	46	100,0

Sumber: Hasil pengolahan data 2018

Hasil rekapitulasi berdasarkan tanggapan responden (n=46) terhadap pertanyaan berkaitan dengan Keterlibatan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota dalam Proses Penyusunan/Revisi RTRWN, dapat diketahui bahwa mayoritas tanggapan responden menyatakan belum pernah dilibatkan (54,3%), meskipun terdapat juga responden yang menyatakan pernah dilibatkan (45,7%). Hasil ini menunjukkan bahwa secara umum responden belum pernah dilibatkan terhadap Keterlibatan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota dalam Proses Penyusunan/Revisi RTRWN.

5. Apakah muatan RTRWN sudah mengakomodir kebutuhan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota? Sebutkan apabila ada yang belum terakomodir?

Tabel 54 Muatan RTRWN Mengakomodir Kebutuhan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota

No.	Tanggapan	Jumlah	Persentase (%)
1.	Belum	2	4,3
2.	Kurang paham	26	56,5
3.	Sudah	17	37,0
4.	Tidak tahu	1	2,2
	Total	46	100,0

Sumber: Hasil pengolahan data 2018

Hasil rekapitulasi berdasarkan tanggapan responden (n=46) terhadap pertanyaan berkaitan dengan Muatan RTRWN Mengakomodir Kebutuhan Pemerintah Provinsi Kabupaten/Kota, dapat diketahui bahwa mayoritas tanggapan responden menyatakan kurang paham (56,5%), meskipun terdapat juga responden yang menyatakan sudah mengakomodir (37,0%) dan belum mengakomodir (4,3%).

Hasil ini menunjukkan bahwa secara umum responden kurang paham terhadap Muatan RTRWN Mengakomodir Kebutuhan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota.

6. Apakah diperlukan sosialisasi yang berkelanjutan kepada Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota terkait RTRWN?

Tabel 55 Sosialisasi Berkelanjutan kepada Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota terkait RTRWN

No.	Tanggapan	Jumlah	Persentase (%)
1.	Ya, perlu	46	100,0
	Total	46	100,0

Sumber: Hasil pengolahan data 2018

Hasil rekapitulasi berdasarkan tanggapan responden (n=46) terhadap pertanyaan berkaitan dengan Sosialisasi Berkelanjutan kepada Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota terkait RTRWN, dapat diketahui bahwa mayoritas tanggapan responden menyatakan ya, perlu (100,0%). Hasil ini menunjukkan bahwa secara umum responden menyatakan ya, perlu terhadap Sosialisasi Berkelanjutan kepada Pemerintah Provinsi, Kabupaten/ Kota.

Saran Responden terhadap Penggunaan RTRWN

1. Secara umum responden menggunakan RTRWN sebagai acuan dalam membuat Rencana Tat Ruang di Provinsi/Kab/Kota.

2. Secara umum responden menyatakan arahan yang terdapat pada KSN sebagai Acuan dalam Menyusun Rencana Tata Ruang di Provinsi/Kab/Kota. Pemda memperhatikan arahan KSN dalam perencanaan pusat kegiatan, dalam penentuan KSP, Terkait program serta penentuan PSN, KSN, stuktur ruang dan system perkotaan, rencana diakomodir, arahan RTRW Kota senantiasa melihat kebijakan nasional untuk disinkronkan dengan program pembangunan kota/kabupaten, dalam proses penyusunan raperda dan materi teknis, Arahan dalam RTRWN dijadikan sebagai dasar awal atau acuan, penentuan arahan prioritas kebijakan nasional, kesesuaian rencana pola ruang, kesesuaian dengan kondisi daerah, kesesuaian RTRW dengan RTRWN, acuan RTRWN yang harus dijadikan acuan, kebijakan struktur ruang dan kawasan yang diprioritaskan pada kawasan yang berkaitan dengan sistem nasional, proyek strategis nasional yang harus diakomodir dalam RTRWN Nasional, proyek strategis nasional harus diakomodir dalam RTRW Kabupaten/Kota, rencana struktur dan ketentuan-ketentuan yang ada diadopsi pada RTRWP, seluruh kebijakan nasional tercantum dalam RTRW Kota, dan sesuai dengan hirarki struktur ruang.

1. Secara umum responden belum pernah mengikuti sosialisasi dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah terkait RTRWN.
2. Secara umum responden belum pernah dilibatkan terhadap Keterlibatan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota dalam Proses Penyusunan/Revisi RTRWN.

3. Secara umum responden kurang paham terhadap Muatan RTRWN Mengakomodir Kebutuhan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota.
4. Secara umum responden menyatakan perlu Sosialisasi Berkelanjutan kepada Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota.

9) 3.4.4 Tingkat Penggunaan RTR Pulau/Kepulauan

Tingkat Penggunaan RTR Pulau/Kepulauan

1. Apakah RTR Pulau/Kepulauan digunakan sebagai acuan dalam membuat Rencana Tata Ruang di Provinsi/Kab/Kota?

Tabel 56 RTR Pulau/Kepulauan digunakan sebagai acuan dalam membuat Rencana Tata Ruang di Provinsi/Kab/Kota

No.	Tanggapan	Jumlah	Persentase (%)
1.	Belum	6	13,0
2.	Tidak tahu	9	19,6
3.	Ya	31	67,4
	Total	46	100,0

Sumber: Hasil pengolahan data 2018

Hasil rekapitulasi berdasarkan tanggapan responden (n=46) terhadap pertanyaan berkaitan dengan RTR Pulau/Kepulauan digunakan sebagai acuan dalam membuat Rencana Tata Ruang di Provinsi/Kab/Kota, dapat diketahui bahwa mayoritas tanggapan responden menyatakan ya (67,4%), meskipun terdapat juga responden yang menyatakan tidak tahu (19,6%) dan belum (13,0%). Hasil ini menunjukkan bahwa secara umum responden menyatakan Ya terhadap RTR Pulau/Kepulauan digunakan sebagai acuan dalam membuat Rencana Tata Ruang di Provinsi/Kab/Kota.

2. Sejauh manakah RTR Pulau/Kepulauan digunakan sebagai acuan dalam menyusun Rencana Tata Ruang di Provinsi/Kab/Kota?

Tabel 57 RTR Pulau/Kepulauan digunakan sebagai acuan dalam menyusun Rencana Tata Ruang di Provinsi/Kab/Kota

No.	Tanggapan	Jumlah	Persentase (%)
1.	Belum sesuai	4	8,7
2.	Cukup sesuai	26	56,5
3.	Kurang paham	15	32,6
4.	Tidak sesuai	1	2,2
	Total	46	100,0

Sumber: Hasil pengolahan data 2018

Hasil rekapitulasi berdasarkan tanggapan responden (n=46) terhadap pertanyaan berkaitan dengan RTR Pulau/Kepulauan digunakan sebagai acuan dalam menyusun Rencana Tata Ruang di Provinsi/Kab/Kota, dapat diketahui bahwa mayoritas tanggapan responden menyatakan cukup sesuai (56,5%), meskipun terdapat juga responden yang menyatakan kurang paham (32,6%) dan belum sesuai (8,7%). Hasil ini menunjukkan bahwa secara umum responden menyatakan cukup sesuai terhadap RTR Pulau/Kepulauan digunakan sebagai acuan dalam menyusun Rencana Tata Ruang di Provinsi/Kab/Kota.

Memperhatikan arahan rencana struktur dan pola ruang, arahan pemanfaatan, Sebagai acuan dasar penyusunan provinsi kepulauan, Belum seintensif RTRWN, Penyesuaian RTRWN dengan RTR kepulauan, Dipertimbangkan arahan Struktur Ruangnya, dan arahan fungsi wilayah secara umum,

3. Apakah pernah ada sosialisasi dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah daerah terkait RTR Pulau/Kepulauan?

Tabel 58 Sosialisasi dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah terkait RTR Pulau/Kepulauan

No.	Tanggapan	Jumlah	Persentase (%)
1.	Pernah	18	39,1
2.	Tidak pernah	17	37,0
3.	Tidak tahu	11	23,9
	Total	46	100,0

Sumber: Hasil pengolahan data 2018

Hasil rekapitulasi berdasarkan tanggapan responden (n=46) terhadap pertanyaan berkaitan dengan Sosialisasi dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah terkait RTR Pulau/Kepulauan, dapat diketahui bahwa mayoritas tanggapan responden menyatakan pernah (39,1%), meskipun terdapat juga responden yang menyatakan tidak pernah (37,0%) dan tidak tahu (23,9%). Hasil ini menunjukkan bahwa secara umum responden menyatakan pernah ada sosialisasi dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah terkait RTR Pulau/Kepulauan.

Saran Responden terhadap Tingkat Penggunaan RTR Pulau/Kepulauan

1. Secara umum responden menyatakan bahwa RTR Pulau/Kepulauan digunakan sebagai acuan dalam membuat Rencana Tata Ruang di Provinsi/Kab/Kota.
2. Secara umum responden menyatakan bahwa cukup sesuai RTR Pulau/Kepulauan digunakan sebagai acuan dalam menyusun Rencana Tata Ruang di Provinsi/Kab/Kota. Memperhatikan arahan rencana struktur dan pola ruang, arahan pemanfaatan, Sebagai acuan dasar penyusunan provinsi kepulauan, Belum seintensif RTRWN, Penyesuaian RTRWP dengan RTR

kepulauan, Dipertimbangkan arahan Struktur Ruangnya, dan arahan fungsi wilayah secara umum,

3. Secara umum responden menyatakan pernah ada sosialisasi dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah terkait RTR Pulau/Kepulauan.

10) 3.4.5 Tingkat Penggunaan RTR KSN

1. Apakah kebijakan yang ada di RTR KSN digunakan sebagai arahan dalam penyusunan Rencana Tata Ruang di daerah? Kebijakan mana saja yang digunakan atau tidak digunakan? sebutkan alasannya?

Tabel 59 Kebijakan RTR KSN Digunakan sebagai Arahan dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang di Daerah

No.	Tanggapan	Jumlah	Persentase (%)
1.	Kurang paham	5	10,9
2.	Tidak tahu	8	17,4
3.	Ya, digunakan	33	71,7
	Total	46	100,0

Sumber: Hasil pengolahan data 2018

Hasil rekapitulasi berdasarkan tanggapan responden (n=46) terhadap pertanyaan berkaitan dengan Kebijakan RTR KSN Digunakan sebagai Arahan dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang di Daerah, dapat diketahui bahwa mayoritas tanggapan responden menyatakan Ya, digunakan (71,7%), meskipun terdapat juga responden yang menyatakan tidak tahu (17,4%) dan kurang paham (10,9%). Hasil ini menunjukkan bahwa secara umum responden menyatakan Ya, digunakan terhadap Kebijakan RTR KSN Digunakan sebagai Arahan dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang di Daerah.

2. Apakah RTR KSN mendukung dalam penyusunan RTRW dan RTR di Provinsi/Kabupaten?

Tabel 60 Dukungan RTR/KSN dalam Penyusunan RTRW dan RTR di Provinsi/Kabupaten

No.	Tanggapan	Jumlah	Persentase (%)
1.	Tidak	1	2,2
2.	Tidak tahu	6	13,0
3.	Ya, mendukung	39	84,8
	Total	46	100,0

Sumber: Hasil pengolahan data 2018

Hasil rekapitulasi berdasarkan tanggapan responden (n=46) terhadap pertanyaan berkaitan dengan Dukungan RTR/KSN dalam Penyusunan RTRW dan RTR di Provinsi/Kabupaten/Kota, dapat diketahui bahwa mayoritas tanggapan responden menyatakan Ya, mendukung (84,8%), meskipun terdapat juga responden yang menyatakan tidak tahu (13,0%) dan tidak (2,2%). Hasil ini menunjukkan bahwa secara umum responden Ya, mendukung terhadap Dukungan RTR/KSN dalam Penyusunan RTRW dan RTR di Provinsi/Kabupaten.

3. Apakah RTR KSN yang ada memberikan manfaat pada penyusunan rencana tata ruang di daerah?

Tabel 61 Manfaat RTR KSN pada Penyusunan Rencana Tata Ruang di Daerah

No.	Tanggapan	Jumlah	Persentase (%)
1.	Tidak tahu	5	6,5
2.	Ya, bermanfaat	41	78,3
	Total	46	100,0

Sumber: Hasil pengolahan data 2018

Hasil rekapitulasi berdasarkan tanggapan responden (n=46) terhadap pertanyaan berkaitan dengan Manfaat RTR KSN pada Penyusunan Rencana Tata Ruang di Daerah, dapat diketahui bahwa mayoritas tanggapan responden menyatakan Ya, bermanfaat (78,3%), meskipun terdapat juga responden yang menyatakan tidak tahu (6,5%). Hasil ini menunjukkan bahwa secara umum responden menyatakan Ya, bermanfaat terhadap Manfaat RTR KSN pada Penyusunan Rencana Tata Ruang di Daerah.

4. Apakah pernah ada sosialisasi dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah daerah tentang RTR KSN (yang sudah perda) di daerah tersebut?

Tabel 62 Sosialisasi dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah daerah tentang RTR KSN (yang sudah perda) di Daerah

No.	Tanggapan	Jumlah	Persentase (%)
1.	Pernah	20	43,5
2.	Tidak pernah	11	23,9
3.	Tidak tahu	15	32,6
	Total	46	100,0

Sumber: Hasil pengolahan data 2018

Hasil rekapitulasi berdasarkan tanggapan responden (n=46) terhadap pertanyaan berkaitan dengan Sosialisasi dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah tentang RTR KSN (yang sudah perda) di Daerah, dapat diketahui bahwa mayoritas tanggapan responden menyatakan pernah (43,5%), meskipun terdapat juga responden yang menyatakan tidak tahu (32,6%) dan tidak pernah (23,9%). Hasil ini menunjukkan bahwa

secara umum responden menyatakan pernah terhadap Sosialisasi dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah tentang RTR KSN (yang sudah Perda) di Daerah.

Saran Responden terhadap Tingkat Penggunaan RTR KSN

1. Secara umum responden menyatakan setuju Kebijakan RTR KSN Digunakan sebagai Arahan dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang di Daerah.
2. Secara umum responden menyatakan mendukung terhadap RTR/KSN dalam Penyusunan RTRW dan RTR di Provinsi/Kabupaten.
3. Secara umum responden menyatakan bahwa ada Manfaat RTR KSN pada Penyusunan Rencana Tata Ruang di Daerah.
4. Secara umum responden menyatakan pernah ada sosialisasi dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah tentang RTR KSN (yang sudah Perda) di Daerah.

11) 3.4.6 Sistem Informasi Tata Ruang Nasional (SITARUNAS)

1. Apakah instansi anda memiliki alamat website ? (Ya/Tidak), Jika Ya, alamat website

Tabel 63 Kepemilikan Website Instansi

No.	Tanggapan	Jumlah	Persentase (%)
1.	Tidak ada	17	37,0
2.	Tidak tahu	4	8,7
3.	Ya	25	54,3
	Total	46	100,0

Sumber: Hasil pengolahan data 2018

Hasil rekapitulasi berdasarkan tanggapan responden (n=46) terhadap pertanyaan berkaitan dengan Kepemilikan Website

Instansi, dapat diketahui bahwa mayoritas tanggapan responden menyatakan Ya (54,3%), meskipun terdapat juga responden yang menyatakan Tidak ada (37,0%) dan tidak tahu (8,7%). Hasil ini menunjukkan bahwa secara umum responden menyatakan Ya terhadap Kepemilikan Website Instansi.

2. Apakah instansi anda menyajikan data RTRW Provinsi/Kab didalam website? (Ya/Tidak)

Tabel 64 PenyajianData RTRW Provinsi/Kab didalam Website

No.	Tanggapan	Jumlah	Persentase (%)
1.	Tidak	22	47,8
2.	Tidak tahu	2	4,3
3.	Ya	22	47,8
	Total	46	100,0

Sumber: Hasil pengolahan data 2018

Hasil rekapitulasi berdasarkan tanggapan responden (n=46) terhadap pertanyaan berkaitan dengan Penyajian Data RTRW Provinsi/Kab didalam Website, dapat diketahui bahwa mayoritas tanggapan responden menyatakan Ya dan Tidak (47,8%), meskipun terdapat juga responden yang menyatakan tidak tahu (4,3%). Hasil ini menunjukkan bahwa secara umum responden menyatakan ya dan tidak terhadap Penyajian Data RTRW Provinsi/Kab didalam Website.

3. Apakah pernah ada sosialisasi dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah daerah tentang Aplikasi Sistem Informasi Tata Ruang Nasional (SITARUNAS)? Jika belum, apakah perlu adanya sosialisasi SITARUNAS?

Tabel 65 Sosialisasi dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah Tentang Aplikasi Sistem Informasi Tata Ruang Nasional (SITARUNAS)

No.	Tanggapan	Jumlah	Persentase (%)
1.	Ada	1	2,2
2.	Belum dan perlu	36	78,3
3.	Tidak ada	4	8,7
4.	Tidak tahu	5	10,9
	Total	46	100,0

Sumber: Hasil pengolahan data 2018

Hasil rekapitulasi berdasarkan tanggapan responden (n=46) terhadap pertanyaan berkaitan dengan Sosialisasi dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah tentang

Aplikasi Sistem Informasi Tata Ruang Nasional (SITARUNAS), dapat diketahui bahwa mayoritas tanggapan responden menyatakan belum dan perlu (78,3%), meskipun terdapat juga responden yang menyatakan tidak tahu (10,9%) dan tidak ada (8,7%). Hasil ini menunjukkan bahwa secara umum responden menyatakan Belum dan perlu terhadap Sosialisasi dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah tentang Aplikasi Sistem Informasi Tata Ruang Nasional (SITARUNAS).

Saran Responden terhadap Sistem Informasi Tata Ruang Nasional (SITARUNAS)

1. Secara umum responden menyatakan memiliki Website Instansi.
2. Secara umum responden menyatakan cukup mengerti terhadap Penyajian Data RTRW Provinsi/Kab didalam Website.
3. Secara umum responden menyatakan Belum ada sosialisasi dari Pusat terkait SITARUNAS dan perlu Sosialisasi dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah tentang Aplikasi Sistem

Informasi Tata Ruang Nasional (SITARUNAS).

IV. KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil wawancara selama lima bulan adalah:

Norma standar pedoman dan kriteria secara umum sudah dipahami responden memahami tentang NSPK, namun masih ada kekurangan di komponen muatan RTR KSP/KSK, typologi KSP dan KSK, data aspek dalam penyusunan RTR KSP/KSK dan dokumen materi teknis. Sudah melampaui target.

Tingkat penggunaan RTRWN secara umum sudah dipahami responden, namun masih ada kekurangpahaman pada komponen Sumber pendanaan untuk perwujudan struktur ruang dan pola ruang KSN, Deliniasi RTR Kawasan Strategis Nasional, Skala peta dalam RTR Kawasan Strategis Nasional, isu strategis nasional dari sudut kepentingan Kebencanaan.

Secara umum responden memahami tentang RTR Pulau/Kepulauan, namun masih ada kekurangpahaman di komponen Peta pola dan struktur ruang RTR Pulau/Kepulauan, Skala peta untuk RTR Pulau dan Kepulauan, Rencana rinci yang disusun sebagai penjabaran dan perangkat operasional dan Bentuk legal aspek dari RTR Pulau/Kepulauan.

Secara umum responden memahami tentang RTR Kawasan Strategis Nasional, namun masih ada kekurangpahaman pada komponen Sumber pendanaan untuk perwujudan struktur ruang dan pola ruang KSN, Deliniasi RTR Kawasan Strategis Nasional, Skala peta dalam RTR Kawasan Strategis Nasional, isu strategis nasional dari sudut kepentingan Kebencanaan.

Secara umum responden memahami tentang sistem informasi Tata Ruang Nasional.

REFERENSI

- [1] Mangkuprawira, Tb. Sjafari. 2003. Manajemen Sumber Daya Manusia Strategik. Jakarta. Ghafliia Indonesia.
- [2] Riduwan. 2008. Dasar-dasar Statistika. Bandung: Alfabeta
- [3] <http://www.pelajaran.co.id/2016/26/pengertian-aplikasi-dan-klasifikasi-aplikasi-menurut-para-ahli-lengkap.html>
- [4] <http://www.sumberpengertian.co/pengertian-e-learning>
- [5] http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/577/jbptunikompp-gdl-purwitaang-28844-9-unikom_p-i.pdf
- [6] https://id.wikipedia.org/wiki/Karya_ilmiah
- [7] <http://indahpermata6.blogspot.co.id/2013/06/pengertian-rancang-bangun-dan-konsep.html>